



PUBLIC AFFAIRS CORNER

2024 dan Seperempat Abad Public Affairs Indonesia: Tinjauan dan Arah Baru

Public Affairs adalah fungsi korporat yang menangani faktor-faktor non-pasar—sosial, politik dan budaya—yang melingkupi suatu korporasi atau organisasi dan memengaruhi interaksinya dengan para pemangku kepentingan. Dari perspektif ini, tahun 2024 yang akan segera berakhir menjadi tahun yang sangat dinamis, dipenuhi berbagai aktivitas politik dan sosial terkait pemilihan umum di tingkat nasional dan regional dan segala dinamika yang menyertainya.

Secara konkret, praktik *public affairs* mencakup berbagai hal, mulai dari pemantauan kerangka hukum dan perundang-undangan yang memengaruhi operasional perusahaan. Perusahaan, terutama yang berskala besar, harus memahami pergerakan politik di tingkat nasional maupun lokal, karena setiap perubahan kebijakan dapat berdampak langsung terhadap jalannya bisnis. Dalam ekonomi modern, *regulatory framework* ini sangat dinamis. Adakalanya perusahaan perlu melakukan advokasi untuk menyelaraskan operasi, meluruskan persepsi, atau menggerakkan perubahan.



Noke Kiroyan
Chairman & Chief Consultant
KIROYAN Partner

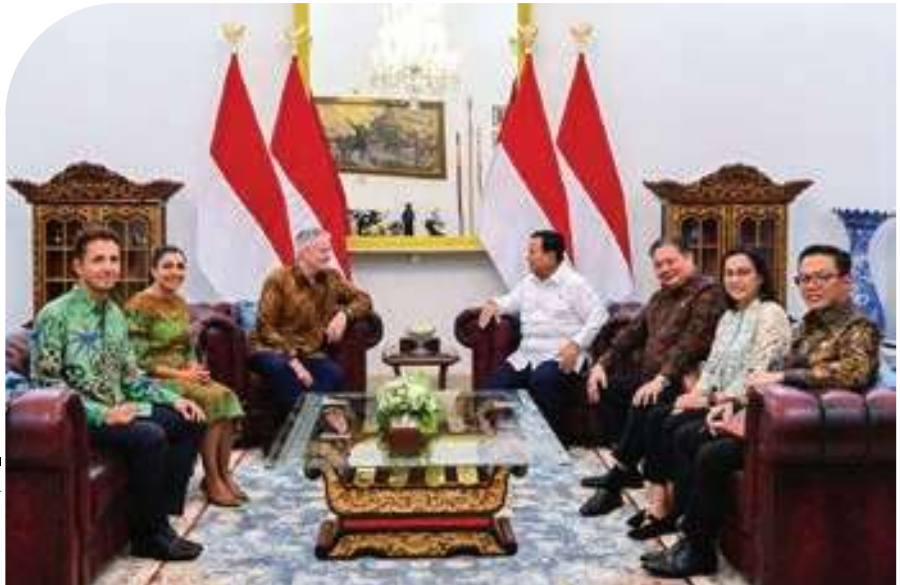


Foto: BPMI Setpres_Rusman

Presiden Prabowo Subianto menerima Sekjen OECD Mathias Cormann, untuk membahas perkembangan ekonomi Indonesia serta proses akses Indonesia ke OECD, Kamis (28_11_2024).

Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas, salah satu kegiatan utama yang dilakukan sebelum melakukan aksi adalah *stakeholder management*, yang dimulai dengan identifikasi pemangku kepentingan untuk melakukan *engagement* yang terarah. Kesalahan dalam mengidentifikasi atau menilai pemangku kepentingan bisa berisiko buruk bagi operasional perusahaan, atau bahkan reputasinya, dengan dampak jangka panjang.

Public affairs berkembang dalam kerangka demokrasi yang memungkinkan perbedaan pendapat secara terbuka. Ini berarti memberi ruang bagi siapapun untuk mengkaji dan mengadu gagasan atau konsep di ruang publik tanpa intervensi penguasa. Dengan premis ini, penulis melihat tahun 2000 sebagai

titik awal *public affairs* di Indonesia. Di tahun tersebut, Presiden B.J. Habibie memberikan kejutan positif dengan mencabut kewajiban media mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sebagai alat pengendali pernyataan pendapat di masa Orde Baru.

Dalam mengkaji dan mengadu gagasan, terkadang diperlukan pembentukan aliansi atau koalisi antar beberapa pihak untuk melakukan advokasi. Inilah perbedaan utama antara *lobbying* dan *public affairs*, yang kini lebih mengerucut dalam definisi yang berkembang di negara-negara maju. Semula, keduanya sering dianggap sinonim. *Lobbying* merupakan kegiatan yang dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi publik, sedangkan *public affairs*, meskipun tujuannya sering kali



sama dengan *lobbying*, mensyaratkan keterlibatan publik dan media sebagai mitra dalam proses advokasi.

Karena itu, praktisi *public affairs* harus memiliki keahlian dan keterampilan dalam berhubungan dengan media, selain pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai isu yang diadvokasi. Ketika gagasan disampaikan secara terbuka, media dan publik berhak mempertanyakan dan mengkritisi keabsahan gagasan tersebut.

Pemerintah adalah *stakeholder* utama yang memengaruhi lingkup operasi perusahaan. Secara sederhana, lembaga eksekutif mengatur jalannya roda pemerintahan melalui kebijakan, peraturan dan perundangan-undangan. Lembaga legislatif memegang peran penting dalam pembentukan undang-undang dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas eksekutif. Sementara lembaga yudikatif bertugas mengadili pelanggaran atau menyelesaikan sengketa antar pihak. Dalam negara yang menganut azas demokrasi, perimbangan kekuasaan antar lembaga ini merupakan fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam situasi yang tidak demokratis, di mana kebebasan berekspresi terbatas dan pers tidak memiliki keleluasaan untuk menyuarakan pendapatnya, *lobbying* menjadi alternatif yang sering digunakan. Aktivitas ini dilakukan secara tertutup, oleh karena itu rentan terhadap penyalahgunaan, terutama di negara yang belum memiliki regulasi yang jelas untuk mengatur dan mengawasi praktik *lobbying*, seperti Indonesia.

Salah satu peran utama *public affairs* adalah menjembatani kepentingan bisnis dengan lembaga pemerintah. Karenanya, setiap peristiwa politik yang berdampak terhadap pelaksanaan bisnis mendapat perhatian khusus. Hal ini terutama berlaku saat terjadi pergantian pejabat—baik secara individu dalam

rangka mutasi jabatan maupun secara massal dalam rangka alih kekuasaan di lembaga legislatif dan eksekutif, menyusun pelaksanaan pemilihan umum di tingkat nasional maupun regional.

Tahun 2024, yang dipenuhi oleh kegiatan politik di berbagai level dan wilayah, menjadi tahun yang “super sibuk” dalam praktik *public affairs*. Namun, di tengah segala kesibukan ini, penting untuk terus memperkuat landasan ilmiah praktik dan disiplin ilmu terapan ini, untuk mempersiapkan perkembangannya ke depan. Dalam rangka ini, penulis telah menyelesaikan buku kedua yang berjudul “*Public Affairs Sebagai Penunjang Manajemen Strategis*”, bekerja sama dengan penerbit Rajawali Pers. Gagasan ini telah dikaji di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada Oktober lalu, dalam forum ilmiah dengan panelis Prof. Dr. der Soz. Gumilar Somantri dan Prof. Dr. Ibnu Hamad, keduanya anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, serta Karl Isaksson, CEO Kreab Worldwide, mitra Kiroyan Partners, yang berbasis di Stockholm, Swedia.

Empat tahun lalu, PT Media Piar Indonesia, penerbit majalah PR Indonesia, menerbitkan buku pertama “*Public Affairs: Teori dan Praktik*”, yang merangkai berbagai karya penulis, sebagian besar bersumber dari artikel-artikel di majalah PR Indonesia. Buku yang diterbitkan tahun ini adalah karya yang khusus ditulis dalam format buku yang utuh, bukan kumpulan tulisan singkat yang dirangkai. Kedua buku ini diharapkan memberikan landasan teori yang kuat dalam praktik *public affairs*. Praktik tanpa landasan ilmiah yang jelas sulit untuk berkembang, terlebih dengan sifat *public affairs* yang menangani faktor-faktor non-pasar yang dinamis dan berkelindan dengan perkembangan global.

Di tataran internasional, pada 2024 terbit buku “*Research Handbook on*

Public Affairs” yang disunting oleh Arco Timmermans, pakar *public affairs* di Universitas Leiden, Belanda. Buku ini memuat kajian mutakhir tentang disiplin dan praktik *public affairs* melalui 24 tulisan dari para pakar kontemporer, seperti Craig S. Fleisher dan Phil Harris. Keduanya sebelumnya menyunting buku “*The SAGE Handbook of International Corporate and Public Affairs*” pada 2017, yang merupakan perluasan dan pendalaman dari “*The Handbook of Public Affairs*” yang terbit pada 2005. Belum lama berselang, pada 2022, Harris & Fleisher bersama dua akademisi lainnya menerbitkan “*The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs*” dalam dua jilid, yang sangat bermanfaat sebagai referensi di bidang ini.

Tahun 2025 akan menandai seperempat abad *public affairs* di Indonesia, jika kita menyepakati keputusan Presiden Habibie pada 2000 yang membidani kelahirannya. Situasi sosial dan politik Indonesia semakin kompleks seiring kemajuan negara ini. Terlebih lagi, sangat aktifnya Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai forum internasional sejak awal pemerintahannya, serta tekad beliau untuk mempertahankan demokrasi, niscaya *public affairs* akan semakin memainkan peranan penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. ●



Foto: Pavel Danilyuk via Pexels

Ilustrasi negosiasi.